

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DIMODERASI BUDAYA TRI HITA KARANA
(Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU NADYA DEWI PUTRI PAWITYA
NIM : 1915644098**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI
BUDAYA TRI HITA KARANA
(Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan)**

**Putu Nadya Dewi Putri Pawitya
1915644098**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak memiliki peran terkemuka dalam unsur pendapatan negara. Kepatuhan membayar pajak adalah fondasi agar penerimaan pajak sesuai yang direncanakan dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan negara. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan di Indonesia mengalami peningkatan namun tidak mencapai persentase yang maksimal yaitu 100%. Di beberapa daerah rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan seperti yang terjadi pada KPP Pratama Tabanan. Direktorat Jendral Pajak melakukan pengoptimalisasian penerimaan pajak dengan penerapan teknologi dengan pemanfaatan sistem informasi perpajakan dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Selain itu, menegakkan hukum secara pidana dan perdata yang diselaraskan dengan nilai budaya Tri Hita Karana dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan budaya Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sampel penelitian ini didasarkan dengan metode *probability sampling* menggunakan *simple random sampling* dengan jumlah sampel 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP Pratama Tabanan. Pengujian statistik untuk menguji hipotesis menggunakan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS 3.3.9.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan (3) budaya Tri Hita Karana dapat memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain selain variabel sistem informasi perpajakan, budaya Tri Hita Karana dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Sistem Informasi Perpajakan, Budaya Tri Hita Karana, Kepatuhan Wajib Pajak

**THE IMPACT OF TAX INFORMATION SYSTEMS ON PERSON
TAXPAYERS COMPLIANCE WITH TRI HITA KARANA CULTURE
AS MODERATING VARIABLE
(Case Study on WPOP Registered in KPP Pramama Tabanan)**

**Putu Nadya Dewi Putri Pawitya
1915644098**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes play a leading role in the state's revenue element. Tax compliance is the foundation for tax revenue to be as planned and contribute maximally to the country's development. The ratio of taxpayer compliance in reporting annual tax returns in Indonesia has increased but has not reached the maximum percentage of 100%. In some areas, the ratio of taxpayer compliance has decreased, as happened at KPP Pratama Tabanan. The Directorate General of Taxes optimizes tax revenue by applying technology through the use of tax information systems to carry out tax administration. In addition, enforcing criminal and civil laws that are harmonized with the cultural value of Tri Hita Karana can be used as a guide for taxpayers to carry out tax obligations.

This research was conducted at KPP Pratama Tabanan. This study uses primary data types obtained through the distribution of questionnaires and secondary data obtained through documentation. The sample of this study was based on the probability sampling method using simple random sampling with a sample size of 100 individual taxpayers who were registered as mandatory annual tax returns at KPP Pratama Tabanan. Statistical testing to test the hypothesis using the Partial Least Square (PLS) test tool with SmartPLS 3.3.9.

The results of this study indicate that: (1) the tax information system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance; (2) Tri Hita Karana culture has a significant positive effect on individual taxpayer compliance; and (3) Tri Hita Karana culture can moderate the relationship between the influence of the tax information system and individual taxpayer compliance. Further research is expected to add other variables besides the variables of tax information systems, Tri Hita Karana culture, and taxpayer compliance.

Keywords : Tax Information System, Tri Hita Karana Culture, Taxpayer Compliance

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DIMODERASI BUDAYA TRI HITA KARANA
(Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : PUTU NADYA DEWI PUTRI PAWITYA
NIM : 1915644098**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Nadya Dewi Putri Pawitya

NIM : 1915644098

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Budaya Tri Hita
Karana (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP
Pratama Tabanan)

Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM

Anak Agung Putri Suardani, SE., MM

Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung,



Putu Nadya Dewi Putri Pawitya

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI BUDAYA TRI HITA KARANA (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PUTU NADYA DEWI PUTRI PAWITYA
NIM : 1915644098

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE, Ak.,MM
NIP. 196410161989101001

DOSEN PEMBIMBING II



Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
NIP. 196310261988032001



SKRIPSI

PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI BUDAYA TRI HITA KARANA (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan)

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



2. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017



3. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

NIP. 196809131993032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCOM, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Anak Agung Putri Suardani, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Tabanan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
9. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 15 Juli 2023

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori.....	17
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	30
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
D. Variabel Peneliti dan Definisi.....	43
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Hasil Penelitian	55
B. Hasil Uji Hipotesis	71
C. Pembahasan	75
D. Keterbatasan Penelitian	84
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Implikasi	87
C. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Penerimaan Pajak dalam APBD	2
Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak Dari WPOP	4
Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh WPOP	5
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Penelitian	45
Tabel 3. 2 Bobot Skor Pilihan Responden	47
Tabel 3. 3 Kategori Skala Nilai <i>Mean</i> Jawaban Responden	51
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Kuseioner Penelitian	56
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	57
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	58
Tabel 4. 7 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Informasi Perpajakan ...	60
Tabel 4. 8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	61
Tabel 4. 9 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Budaya Tri Hita Karana.....	62
Tabel 4. 10 Nilai <i>Outer Loadings</i>	65
Tabel 4. 11 Nilai <i>Average Variance Extractes (AVE)</i>	66
Tabel 4. 12 Nilai <i>Cross Loadings</i>	68
Tabel 4. 13 Nilai Korelasi Antar Konstruk	69
Tabel 4. 14 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Dan <i>Composite Reliability</i>	70
Tabel 4. 15 Nilai <i>R-Square</i>	71
Tabel 4. 16 Hasil <i>Boostraping</i> Pengaruh Langsung.....	72
Tabel 4. 17 Hasil <i>Boostraping</i> Pengaruh Moderasi	74

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model UTAUT.....	20
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 2. 3 Hipotesis Penelitian.....	40
Gambar 4. 1 Diagram Jalur (<i>Path Diagram</i>) Sebelum Uji	64
Gambar 4. 2 Diagram Jalur (<i>Path Diagram</i>) Setelah Uji.....	66



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Data dan Informasi kepada Kanwil DJP Bali
- Lampiran 2: Surat Permohonan Data dan Informasi kepada KPP Pratama Tabanan
- Lampiran 3: Surat Persetujuan Izin Riset pada Kanwil DJP Bali
- Lampiran 4: Surat Persetujuan Izin Riset pada KPP Pratama Tabanan
- Lampiran 5: Surat Izin Penyebaran Kuesioner kepada Kanwil DJP Bali
- Lampiran 6: Surat Persetujuan Penyebaran Kuesioner pada KPP Pratama Tabanan
- Lampiran 7: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8: Data Responden
- Lampiran 9: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 10: Hasil Uji *Outer Model*
- Lampiran 11: Hasil Uji *Inner Model*
- Lampiran 12: Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak menyangkut kedudukan terkemuka yang menjadi kekuatan pokok pendapatan suatu negara (Magribi dan Yulianti, 2022). Unsur utama penghasilan negara yang berupaya menyokong dan menstimulus pergerakan perekonomian di Indonesia yang menjadi indikator utama penerimaan tertinggi negara adalah pajak. Negara akan kesulitan memperoleh modal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pembiayaan negara apabila tanpa adanya pemungutan pajak. Masyarakat yang sudah terdaftar wajib pajak diharapkan disiplin dan patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakan, sehingga mampu dalam membantu perekonomian negara. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan fondasi agar penerimaan pajak sesuai apa yang direncanakan, harapannya dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan negara. Pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan melaksanakan reformasi pada sistem perpajakan.

Penerimaan atas pajak di Indonesia tercatat pada Kementerian Keuangan mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 1.587,8 triliun di tahun 2021 dan di tahun 2022 telah tercatat mencapai Rp 2.034,5 triliun melebihi dari target APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) selama 2 tahun berturut-turut (Kementerian Keuangan, 2022). Meskipun target pada tahun 2021 dan 2022

terlampau, pemerintah tetap memastikan bahwa penerimaan pajak dengan adanya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak akan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Berikut merupakan laporan penerimaan pajak 5 tahun terakhir dalam APBN adalah:

Tabel 1. 1
Laporan Penerimaan Pajak dalam APBN
Pada Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan Pajak
2018	1.424,00	1.351,51	92,24%
2019	1.557,52	1.332,06	84,44%
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%
2021	1.268,50	1.597,80	135,96%
2022	1.784,00	2.034,50	114,04%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Pada Tabel 1.1 dicatat mengenai data tahun 2018-2022 tentang realisasi penerimaan atas pajak di dalam APBN. Meskipun pada saat menghadapi gejala pandemi covid-19 yang mengakibatkan realisasi pajak tidak terpenuhi sesuai target yang ditetapkan, namun tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak mengalami gejala peningkatan dari target yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari jerih payah DJP sebagai instansi pemerintah membentuk suatu strategi dalam meningkatkan patuhnya masyarakat dalam membayar kewajibannya sehingga penerimaan yang bersumber dari pajak mengalami peningkatan. Salah satunya yaitu melaksanakan insentif pajak pada saat pandemic covid-19 serta adanya UU harmonisasi perpajakan. Pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa target penerimaan pajak di tahun 2023

mencapai Rp 2.021,2 triliun, target tersebut merupakan target tertinggi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022)

Wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya mengalami suatu peningkatan pada setiap tahun. Di tahun 2021 persentase wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya hingga 84,07% sebanyak 15,9 juta SPT yang dilaporkan dari 19 juta masyarakat wajib pajak, hal tersebut mengalami penumbuhan sebesar 8,30 % dari tahun 2020 (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh di Tahun 2021 oleh WP badan adalah sebesar 61,27% dan oleh WP orang pribadi (karyawan maupun non karyawan) adalah sebesar 72,13% (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Namun kepatuhan wajib pajak terus menjadi perbincangan karena tidak mencapai persentase yang maksimal yaitu 100%.

Kepatuhan wajib pajak badan maupun orang pribadi pada tahun 2021 dan ditahun sebelumnya juga tidak dapat mencapai persentase 100%. Kepatuhan wajib pajak memerlukan peranan individu dalam taat melaksanakan kewajibannya. Di Tabanan, wajib pajak memiliki rasio kepatuhan tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kepatuhan tersebut dimaksud dari jumlah persentase dari penerimaan pajaknya yaitu penerimaan di KPP Pratama Tabanan masih pada kategori rendah apabila disandingkan dengan seluruh KPP Pratama yang bertempat di Bali. Adapun persentase dari penerimaan pajak WPOP di lingkup tujuh KPP Pratama di Provinsi Bali yaitu:

Tabel 1. 2
Total Penerimaan Pajak Dari WPOP
KPP Pratama Se-Provinsi Bali
Tahun 2022

No.	KPP Pratama	WPOP Yang Terdaftar	Penerimaan WPOP
1	Denpasar Barat	148.310	Rp 297.264.724.362
2	Denpasar Timur	137.414	Rp 253.903.652.017
3	Badung Selatan	81.867	Rp 186.465.168.081
4	Badung Utara	106.837	Rp 213.287.578.103
5	Gianyar	312.626	Rp 202.549.959.456
6	Singaraja	162.262	Rp 129.582.024.036
7	Tabanan	213.125	Rp 153.290.185.283

Sumber: Kanwil DJP Bali (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 dicatat penerimaan dari KPP Pratama Tabanan, yang merupakan penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi nomor dua terendah diantara KPP Pratama lainnya yang terdapat di Bali yaitu sebesar Rp 153.290.283 dengan 213.125 WPOP yang terdaftar di tahun 2022. KPP Pratama Singaraja menduduki peringkat nomor satu terendah, namun memiliki 162.262 WPOP yang terdaftar di tahun 2022. Apabila dilakukan perbandingan dengan cara membandingkan jumlah WPOP yang terdaftar dengan penerimaan WPOP, didapatkan hasil bahwa KPP Pratama Tabanan memiliki perbandingan sebesar 1 : 719.250,14 sedangkan KPP Pratama Singaraja sebesar 1 : 798.597,49. Hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat di Tabanan masih memiliki sikap kurang patuh dalam membayar pajaknya. Selain itu, dapat dilihat pada pelaporan SPT Tahunnya pada Tabel 1.3, dapat memberikan suatu petunjuk adanya suatu indikasi bahwa rendahnya kepatuhan WPOP yang berada di Tabanan. Berikut merupakan tingkat kepatuhan SPT terlapor oleh wajib pajak orang pribadi tahun 2018 sampai 2022 pada KPP Pratama Tabanan:

Tabel 1. 3
Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Oleh WPOP
Pada KPP Pratama Tabanan
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Tabanan	Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Realisasi SPT Terlapor	Rasio Kepatuhan WPOP
2018	120.671	51.972	42.869	82,48%
2019	130.433	56.574	47.532	84.00%
2020	197.857	70.106	54.492	77,73%
2021	203.814	69.509	65.126	93,69%
2022	213.125	56.361	51.610	91,57%

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2023)

Pada Tabel 1.3, dapat dikatakan bahwa besaran nilai kepatuhan WPOP yang terdaftar wajib SPT pada KPP Pratama Tabanan masih tergolong rendah, dengan melihat dari realisasi pelaporan SPT oleh WPOP rendah apabila dibandingkan dengan WPOP yang terdaftar wajib SPT. Selain itu, di tahun 2021 sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada tahun 2020, namun ditahun 2022 kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tabanan kembali mengalami penurunan yang mengindikasikan turunnya kepatuhan WPOP. Perhitungan rasio kepatuhan WPOP tersebut dihitung dengan cara realisasi pelaporan SPT dilakukan pembagian dengan nilai WPOP yang terdaftar wajib lapor SPT lalu dikalikan dengan 100%.

Pihak Direktorat Jendral Pajak memerlukan suatu strategi yaitu dengan melaksanakan reformasi perpajakan yang berfokus pada peningkatan maupun perbaikan dari sistem perpajakan. Pelaksanaan hal tersebut melalui perbaikan dan penyempurnaan tata kelola administrasi perpajakan yang dihubungkan dengan datangnya perkembangan ilmu teknologi canggih saat ini yang akan

mengubah sistem yang semula manual menjadi suatu sistem elektronik yang bersifat mudah dan cepat. Hal tersebut akan memberikan berbagai macam penyelesaian masalah yang muncul di dunia khususnya pada bidang perpajakan. Salah satu cara DJP untuk melakukan pengoptimalisasian atas penerimaan pajak yaitu dengan dilaksanakannya penerapan teknologi digital yang diterapkan dalam bidang perpajakan guna memberikan peningkatan atas kualitas layanan serta pengawasan kepada wajib pajak. Hal tersebut dengan memperbaiki proses pelaporan mengenai administrasi perpajakan dengan pemanfaatan sistem informasi.

Pemanfaatan atas teknologi dalam perpajakan tersebut berkaitan dengan sistem informasi perpajakan yang terdapat dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Teknologi tersebut memberikan perubahan pada era evolusi industri saat ini dalam proses perkembangan atas perekonomian suatu negara (Widyari, 2023). Sistem informasi perpajakan merupakan sarana dalam penggunaan teknologi yang dirancang dalam menunjang manajemen serta pengendalian terkait pada aspek informasi perpajakan (Andriana et al., 2020). Dengan adanya sistem informasi akan memberikan persepsi kemudahan serta memberikan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan perpajakan. Memanfaatkan teknologi informasi perpajakan dalam memodernisasi suatu sistem administrasi dapat mempermudah kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan diganti dengan mesin sehingga waktu lebih efisien. Pemanfaatan dari sistem informasi perpajakan diharapkan dapat memberikan

peningkatan terhadap rasa patuh wajib pajak melakukan kewajiban administrasi perpajakannya.

Sistem informasi pajak tersebut dikaitkan dengan adanya reformasi sistem perpajakan yaitu timbulnya keterbaruan dari sistem administrasi perpajakan. Sistem informasi perpajakan yang telah dirancang oleh DJP dengan melaksanakan perbaikan dan perubahan pada suatu program sehingga mampu memberikan tingkat kemudahan dalam melakukan perhitungan serta melakukan pengisian untuk melaporkan SPT oleh wajib pajak. Dengan harapan bahwa memberikan suatu pengaruh peningkatan terhadap rasa patuhnya wajib pajak membayarkan kewajibannya yang berimbang terhadap peningkatan penerimaan atas pajak di Indonesia. Diciptakan kombinasi administrasi perpajakan dengan teknologi informasi dalam membentuk suatu sistem informasi perpajakan harapannya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diterima (Fu et al., 2019). Penggunaan sistem informasi dijadikan sarana bagi pemerintah dalam mengawasi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya ataupun melakukan tindakan penipuan sehingga wajib pajak akan patuh karena merasa diawasi oleh pemerintah.

Satyawati dan Cahjono (2017) menyatakan sistem informasi perpajakan yang dibuat secara sederhana serta mudah diaplikasikan membentuk rasa patuh melaksanakan kewajibannya. Ramdan (2018) menyatakan adanya sistem informasi perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan oleh WP sendiri. Kussuari dan Boenjamin (2019) menghasilkan penelitian sistem informasi perpajakan yang terdiri dari *e-filing* dan e-SPT yang mendapatkan studi hasil

bahwa memiliki pengaruh pada patuhnya wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, *e-billing* tidak dapat mempengaruhi hal tersebut namun apabila sistem informasi perpajakan mempunyai kualitas maka dapat mendorong wajib pajak patuh akan kewajibannya. Penelitian Muttaqin (2022) mengenai sisten informasi dimana mendapatkan hasil berarah positif kepada kepatuhan wajib pajak, dimana sangat efektif dalam memfasilitasi perolehan informasi yang berkaitan dengan pajak.

Namun pada penelitian Magribi dan Yulianti (2022) bertolak belakang, dengan menyatakan bahwa adanya pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP, hal tersebut akibat dari masyarakat yang kurang paham dengan adanya teknologi informasi yang dipergunakan dalam pelaporan perpajakannya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Widyari (2023) bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak atas persepsi kemudahan penggunaan, penggunaan sistem dan kepuasan penggunaan dari sistem informasi perpajakan. Apabila dilihat dari fenomenanya, sistem informasi perpajakan saat ini, terdapat permasalahan seperti kelambanan proses pada saat terjadi beban kerja yang cukup padat yaitu salah satu contohnya pada saat pelaporan SPT tahunan badan maupun orang pribadi yang dilakukan secara *online* ataupun saat membuka *website* resmi DJP sehingga mengindikasikan kualitas sistem tersebut masih dianggap kurang efektif.

Indonesia memiliki strategi kepatuhan perpajakan dengan kesadaran individu sebagai wajib pajak yang berlandaskan penegakan perpajakan berupa

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan budaya Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut berarti jika wajib pajak banyak menggunakan sistem informasi perpajakan dalam melaksanakan kewajibannya, maka kecenderungan tingkat patuhnya wajib pajak juga semakin meningkat.
2. Budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut memiliki artian yaitu semakin tertanamnya nilai budaya pada diri individu sebagai wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan maka sejalan dengan meningkatkannya kepatuhan wajib pajak
3. Budaya Tri Hita Karana memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut memiliki artian wajib pajak tidak menyadari bahwa adanya nilai budaya dalam diri individu yang mempersepsikan suatu hal penting dalam penggunaan sistem informasi perpajakan yang berlandaskan pikiran dan jiwa spiritualisme dalam makna budaya Tri Hita

Karena yang ada dilingkungannya. Wajib pajak tidak yakin pada faktor internal yang tertanam dalam dirinya dalam menggunakan suatu sistem.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil dari analisis serta pembahasan, penelitian ini memiliki suatu implikasi berdasarkan atas hasil analisis penelitian. Adapun implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Telah terlaksanakannya dan mendapatkan hasil penelitian sehingga diharapkan mampu menjadi penambahan informasi, wawasan ilmu serta meningkatkan pemikiran dalam mengembangkan ilmu mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai suatu sistem informasi perpajakan dan nilai dari budaya Tri Hita Karana dalam kegiatan perpajakan. Penelitian ini memperkuat adanya keterkaitan UTAUT dalam mendasari niat dan perilaku individu dalam menggunakan teknologi serta memperkuat TPB yang mendasari niat melaksanakan atau tidaknya perilaku individu tersebut.

2. Implikasi Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi suatu implikasi; 1) bagi mahasiswa, dalam memberikan suatu manfaat dan memperkuat pengetahuan pada bidang perpajakan dan penambahan pengalaman dalam memberikan pola pikir logis dalam mengatasi masalah perpajakan; 2) bagi wajib pajak, dapat memberikan suatu sikap sadar serta motivasi untuk patuh membayarkan kewajiban perpajakannya; 3) bagi Otoritas Pajak, sebagai

bahan evaluasi dan media penyalur informasi dalam merumuskan suatu keputusan terkait sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak; 4) bagi Politeknik Negeri Bali, dapat menjadi sumbangan referensi kepustakaan untuk berkembangnya suatu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serupa dalam rangka mengembangkan pendidikan serta menjadi bahan acuan pada materi perkuliahan.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis serta pembahasan, terdapat saran dalam melakukan pertimbangan sebagai suatu bahan masukan serta perbaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi Otoritas Pajak

Bagi otoritas pajak harapannya dapat mempertegas pelaporan SPT Tahunan maupun kegiatan perpajakan lainnya dengan beralih menggunakan sistem informasi perpajakan. Hal tersebut disertai dengan melakukan sosialisasi penggunaannya, hak dan kewajiban perpajakan, peraturan perpajakan lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan baik secara langsung, media massa maupun melalui media sosial secara efektif. Hal ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui fungsi sistem informasi tersebut serta mempermudah petugas pajak mengenai pengurusan administrasi wajib pajak dan meningkatkan rasa sadar bagi diri wajib pajak karena kemudahannya sistem tersebut. Meningkatkan kualitas sistem informasi perpajakan juga harus dilakukan oleh DJP agar tidak terjadi *error* disaat beban kerja yang tinggi. Selain itu, perlu menjadi bahan pertimbangan bagi

DJP dalam menumbuhkan nilai moral dan pendekatan nilai budaya lokal pada kegiatan perpajakan serta mampu memperkuat penggunaan sistem informasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan patuhnya masyarakat yang wajib melaksanakan kewajibannya.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai masyarakat WPOP agar memiliki sikap peduli dengan penetapan kebijakan pemerintah khususnya pada penggunaan suatu sistem informasi perpajakan, karena pemberlakuan tersebut bertujuan memberikan kemudahan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya tanpa harus ke kantor pajak. Selain itu, wajib pajak harus memiliki sikap pedoman hidup bermasyarakat dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pada dasarnya, nilai yang terkandung di dalam budaya-budaya lokal maupun agama individu memiliki ajaran yang baik dalam bertingkah laku sebagai individu bermasyarakat. Hal tersebut dengan sikap jujur, percaya hukum Karma Phala dalam melaksanakan suatu kegiatan, menciptakan lingkungan harmonis serta saling bergotong royong dalam menciptakan pembangunan negara yang lebih baik.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi penelitian-penelitian berikutnya, penelitian dilakukan dengan lokasi yang berbeda, dilakukan perluasan cakupan atas sampel jumlah responden sehingga mampu menggambarkan ruang lingkup suatu penelitian. Selain itu, dapat dilakukan penambahan variabel penelitian yang berbeda agar penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K. W., Julianto, I. P., Putra, I. N., Jurusan, Y., & Program, A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, GCG, Dan Keberadaan Awig-Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Dengan Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada LPD di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(02), 413–424.
- Afriyanti, N. (2021). *Theory of Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*. CV. Brimedia Global.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Andriana, M., Sumarlin, T., & Panjaitan, R. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kinerja Manajerial Keuangan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.127>
- Ariyanto, D., Sari, M. M. R., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Rekontruksi Konstruksi Faktor Sosial Budaya Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana Pada Model UTAUT. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 399–415. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7062>
- Asriandi, Tenriwaru, & Junaid, A. (2021). Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4 (Vol 4, No 2 (2021), 134–144. <https://doi.org/10.37531/yum.v1i1.75>
- Atmadja, N. B. (2019). *Tri Hita Karana Harmonisasi Harmoni dengan Tuhan, Sesama Manusia, dan Lingkungan Alam untuk Kebahagiaan*.
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis. 4(1), 2615–7039.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2021*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan Tahunan DJP 2020 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021-Bahasa.pdf)

- Fu, C., Xue, M., Xu, D.-L., & Yang, S.-L. (2019). Selecting Strategic Partner For Tax Information Systems Based on Weight Learning With Belief Structures. *International Journal of Approximate Reasoning*, 105, 66–84. <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2018.11.009>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 (Edisi 2)* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. yahoogroups.com/group.Multivariate_SEM
- Handayani, R. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9, 76–88.
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Kanwil DJP Bali. (2023). *Jumlah Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Se-Provinsi Bali*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran dalam APBN*. Kemenku.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023*. Kemenkue.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/perpajakan-tahun-2023-mencapai-Rp2-021,2-triliun>
- Kirana, A., & Rabiyyah, U. (2022). Pengaruh Nilai Budaya Lokal, Nilai Sosial dan Locus Of Control terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan. *18(April)*, 110–122. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- KPP Pratama Tabanan. (2023). *Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Oleh WPOP KPP Pratama Tabanan Tahun 2018-2022*.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- Lestari, A., Faridah, & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Budaya Siri' Na Pacce Terhadap Pembayaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Economic Bosowa Journal*, 7(004), 112–122.

- Lutfillah, N. Q., Mangoting, Y., & Wijaya, R. E. (2023). The Meaning Taxpayer Compliance in Tri Hita Karana's Perspective. In *Proceedings of the 3rd Annual Management, Business and Economics Conference (AMBEC 2021)* (Vol. 1). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-026-8>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development Of An Instrument To Measure The Perceptions Of Adopting An Information Technology Innovation. *Information Systems Research*, 2(3), 192–222. <https://doi.org/10.1287/isre.2.3.192>
- Muttaqin, I. (2022). The Influence of Tax Knowledge and Information Systems to Taxpayer Compliance in the City of Tegal. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 251–255. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546>
- PMK No. 9 /PMK 03/2018. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Aturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan.*
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ramadani, S., Sinring, B., & Tenriwaru, T. (2021). Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dan Pammali Dalam Kepatuhan Pajak Umkm Kota Makassar. *Simak*, 19(01), 1–16. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.176>
- Ramdan, A. (2018). PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 12–27. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.83>
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2017.131.278>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. ALFABETA.

- Tirtayasa, I. B. M., Putra, I. G. C., & Santosa, E. S. (2022). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Pengalaman Kerja, Pelatihan Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. *4*(3), 280–290.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, *27*(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Widyari, N. Y. A. (2023). Analisis Persepsi Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(2), 224–236. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.224-236>
- Wirawan. (2012). *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi dan profesi*. Rajawali Pers.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI